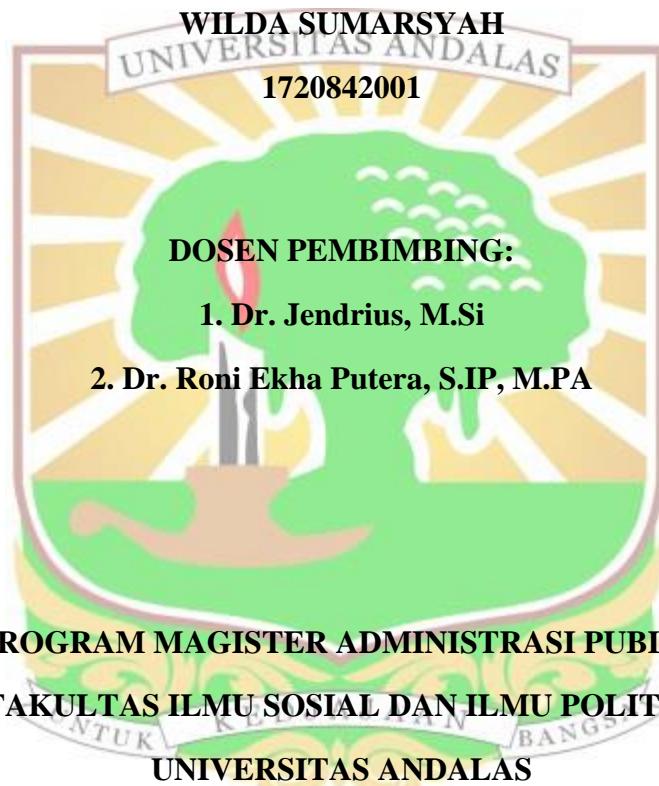


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN KEWENANGAN
PENDIDIKAN MENENGAH ATAS DARI PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI**
(STUDI DI PROVINSI SUMATERA BARAT)

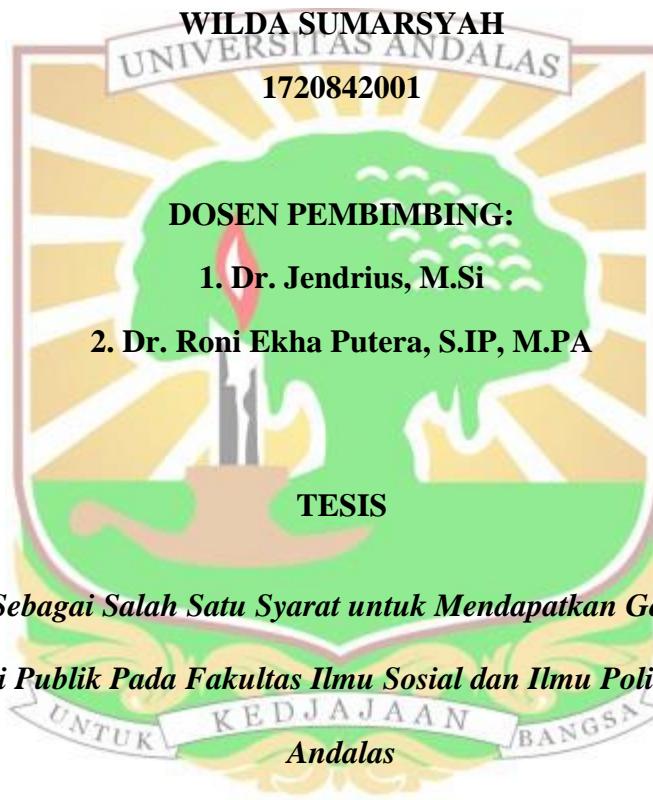
TESIS

OLEH



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN KEWENANGAN
PENDIDIKAN MENENGAH ATAS DARI PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI**
(STUDI DI PROVINSI SUMATERA BARAT)

OLEH



PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020

ABSTRAK

Nama : Wilda Sumarsyah
Program Studi : Magister Administrasi Negara
Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi (Studi di Sumatera Barat)

Disahkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka terjadi peralihan dalam pengelolaan yang berhubungan dengan bidang pendidikan menengah. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mendeklarasikan bahwa kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten atau kota diserahkan ke pemerintah provinsi. Tujuan dari penelitian ini, untuk menjelaskan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke Pemerintah Provinsi di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, dengan pendekatan survei. Hasil dari penelitian sesuai dengan teori Edward C III bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi berhubungan positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi di Provinsi Sumatera Barat. Demikian juga secara parsial ditemukan bahwa variabel-variabel tersebut berhubungan positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi di provinsi Sumatera Barat.

Kata kunci : hubungan, komunikasi, sumber daya, sikap, struktur, birokrasi, implementasi

ABSTRACT

Name : Wilda Sumarsyah
Program Study : Magister Administrasi Negara
Title : Implementation of the Policy on Transfer of Secondary Education Authority from District or City Governments to Provincial Governments

The enactment of Law No. 23 of 2014 on Regional Government there is a shift in the management related to the field of secondary education. The law mandates the authority of senior high school management previously administered by the district or city to be handed over to the provincial government. The purpose of this research is to know Implementation of the Policy on Transfer of Secondary Education Authority from District or City Governments to West Sumatera Provincial Government. This study used quantitative methods, with a survey approach. The results of this study are consistent with the theory stated by Edward C. III that the policy implementation is influenced by four factors, communication, resources, executive attitudes, and bureaucratic structure. Based on the results of analysis, it can be concluded that the variables of communication, resources, executive attitudes, and bureaucratic structures positive and significant correlation on Implementation of the Policy on Transfer of Secondary Education Authority from District or City Governments to Provincial to West Sumatera Provincial Government. Likewise, it was found that partial variables positive and significant correlation on Implementation of the Policy on Transfer of Secondary Education Authority from District or City Governments to West Sumatera Provincial Government.

Key Words : correlation, communication, resources, attitudes, bureaucratic, structure, implementation.